



Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora
Vol. 01 No. 1, April 2022, 59-70
e-ISSN: 2829-4831 | p-ISSN: 2829-4955

Tinjauan Historis Pengungsian Vietnam di Pulau Galang 1979-1996

Historical Overview of Vietnamese Refugees in Galang Island 1979-1996

Zendri Hendri ✉ Universitas Negeri Jakarta
Rahmad Dandi, Universitas Riau

✉ zendrisulaini@gmail.com

ABSTRACT

Vietnam's long history starts from the effort to gain independence from France, the prolonged civil war between Communist North Vietnam and nationalist South Vietnam, to the Vietnamese invasion of Cambodia, which led to the massive migration of Vietnamese people to various countries using boats so that refugees This Vietnamese, known as the "Boat People." This study provides a comprehensive explanation of the background of the migration of Vietnamese refugees to Galang Island, the role of UNHCR and the Government of Indonesia in overcoming these problems, and their lives on Galang Island. This historical research was carried out successively from the heuristic process taken from the Vietnam-camp refugee document and observations on Galang Island. The data is then verified, interpreted analytically and synthetically, and presented in descriptive-explanative historiography. Apart from the pluses and minuses of various aspects of the history of Vietnamese refugees on Galang Island from 1979 to 1996, the Indonesian government has been maximal in overcoming the problem of Vietnamese refugees.

Keywords: Galang Island; Vietnamese Refugees.

ABSTRAK

Sejarah panjang Vietnam dimulai dari upaya memperoleh kemerdekaannya atas Perancis, perang saudara berkepanjangan antara Vietnam Utara yang berpaham Komunis dan Vietnam Selatan yang berpaham nasionalis, hingga invasi Vietnam ke Kamboja, yang berujung pada migrasi besar-besaran masyarakat Vietnam ke berbagai negara menggunakan perahu sehingga para pengungsi Vietnam ini, dikenal dengan sebutan "Manusia Perahu". Penelitian ini memberikan paparan komprehensif tentang latar belakang terjadinya migrasi pengungsi Vietnam ke Pulau Galang, peranan UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan tersebut, dan kehidupannya di Pulau Galang. Penelitian historis ini dilaksanakan secara runtut dari proses heuristik, yang diambil dari dokumen Vietnam-camp refugee, dan observasi di Pulau Galang. Data tersebut kemudian diverifikasi dan diinterpretasikan secara analitis dan sintesis, serta disajikan secara historiografi deskriptif-eksplanatif. Terlepas dari plus minus berbagai sisi sejarah pengungsi Vietnam di Pulau Galang dalam rentang waktu 1979-1996, pemerintah Indonesia telah maksimal mengatasi permasalahan pengungsi Vietnam.

Kata kunci: Pengungsi Vietnam; Pulau Galang.

Received: 19 April 2022 Revised: 25 April 2022 Published: 30 April 2022

Copyright ©2022, Zendri Hendri & Rahmad Dandi
Published by Madrasah Aliyah Negeri 4 Kota Pekanbaru
This is an open access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) International
DOI: [10.56113/takuana.v1i1.24](https://doi.org/10.56113/takuana.v1i1.24)

PENDAHULUAN

Vietnam adalah negara yang ada di Asia Tenggara dengan sejarah panjang dalam usaha meraih dan mempertahankan kemerdekaannya. Sejarah panjang tersebut dimulai dari upaya memperoleh kemerdekaan atas Perancis, lahir dan berkembangnya dua ideologi residu Perang Dunia II (Kapitalis-Liberalisme dan Sosialis-Komunisme), yang pada Konferensi Jenewa membuat Vietnam terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara (Republik Vietnam)¹. Intervensi asing semakin membuat terjadinya segregasi di lapisan masyarakatnya, yakni RRC dan Uni Soviet di Vietnam Utara, karena sesama negara komunis, serta Amerika Serikat dan Sekutunya di Vietnam Selatan. Pertentangan ini mencapai klimaksnya dengan terjadinya perang saudara atau perang Vietnam dari tahun 1957-1975.² 30 April 1975, Saigon ibukota Negara Vietnam Selatan jatuh ketangan Vietnam Utara, yang berujung pada penggabungan kedua negara ini menjadi satu, dengan tekad mengakhiri perang saudara di antara keduanya dan menjadi Negara Republik Sosialis Vietnam dengan Ibu kotanya Ho Chi Minh City.³ Akibatnya, dua juta warga Vietnam terbunuh, tiga juta orang terluka, dan 12 Juta jiwa penduduk Indocina melakukan migrasi atau pengungsian mencari suaka politik ke negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Canada, Jerman, Perancis, Australia, Selandia Baru dan beberapa negara Eropa Barat lainnya.⁴ Keterbatasan kemampuan migrasi terstruktur dan rasa takut dari warga Vietnam Selatan, membuat warga juga melarikan diri menggunakan perahu, sehingga disebutlah para pengungsi ini dikenal dengan sebutan “Manusia Perahu” atau *Boat People*.

Bentangan Kepulauan Natuna Kabupaten Kepulauan Riau saat itu, yang kini telah menjadi Provinsi, dimungkinkan karena jarak pantai terluar Vietnam Selatan tidak begitu jauh dari garis paling utara dari wilayah yurisdiksi Indonesia⁵. Sambutan hangat masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau tersebut, berbalas kunjungan bergelombang berikutnya masyarakat Vietnam sejak kedatangan pertama pada 25 Mei 1975.⁶ Konflik horisontal dengan masyarakat tempatan mengakibatkan instabilitas politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Polsekbudhankam). Diskursus ini juga menjadi topik diskusi organisasi regional dan internasional, yang akhirnya UNHCR (*United Nation High Commisioner For Refugees*) memutuskan Pulau Galang, Indonesia sebagai salah satu tempat *Processing Center for Indochina Refugees* pada tanggal 15-16 Mei 1979. Sama seperti Sikhiu Kamp di Thailand, Pulau Bidong di Malaysia, Kamp di Hong Kong dan di Filipina yang memiliki peran yang sama. Fakta ini penting dipaparkan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang konflik ideologi, perang, residu-nya, migrasi, dan

¹ Demas Nauvarian, “Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam: Faktor Ideologi, Identitas, dan Idealisme,” *Jurnal Hubungan Internasional* 12, no. 2 (December 10, 2019): 265.

² Bunari Bunari Bunari, “Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam,” *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan* 4, no. 1 (2017): 25–37.

³ Nauvarian, “Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam.”

⁴ Kompas, “Pengungsi Vietnam (Boat People)” (Jakarta, Mei 2001).

⁵ Elisa, Yuliantoro, and Asyrul Fiqri, “Pulau Galang Sebagai Pulau Kemanusiaan,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (December 6, 2021): 409–411.

⁶ Katerina Mayumi Simanulang, “Pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 Dalam Rangka Pemulangan Pencari Suaka Asal Vietnam Tahun 1996 Di Pulau Galang Ditinjau Dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-Il.01.10-1297 Perihal Penanganan Terhadap Orang Asing Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi” (s1, UAJY, 2015), accessed April 20, 2022, <http://e-journal.uajy.ac.id/7285/>.

pengejawantahan semangat konsensus kebangsaan oleh masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Fakta sejarah yang terus tumbuh dari masa ke masa, penting untuk hadirkan kearifan bersikap bagi generasi bangsa.

Berpijak pada Teori Konflik oleh Ralf Dahrendorf tentang dua wajah, yakni konflik dan konsensus⁷, menuntun penelitian ini untuk mengungkap perang Vietnam yang melatarbelakangi gelombang migrasi pengungsian, yang kemudian akan disenarai faktor positif (+), negatif (-) dan faktor-faktor netral (0) migrasinya, seperti di rujuk dari Teori Dorong-Tarik/ *Push Pull Factor Theory* Everet S. Lee (1976) dalam Migrasi Ilmu Kependudukan⁸.

Paparan fakta yang diungkap pada penelitian yang dilakukan oleh Elisa dkk berkenaan pengungsian Vietnam di Pulau Galang menyebutkan bahwa ketibaan masyarakat Vietnam di Pulau Galang adalah pada tahun 1976 dan inisiatif masyarakat tersebut.⁹ Padahal penempatan pulau Galang sebagai tempat pengungsian baru ditetapkan 1979. Lalu penelitian lainnya, yang dilakukan oleh Bunari yang berjudul "Pulau Galang sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam" paparkan sisi kehidupan pendidikan dan latihan (Diklat) dan Kesehatan masyarakat pengungsi Vietnam selama berada di Pulau Galang.¹⁰ Penelitian ini untuk meluruskan fakta sejarah penelitian Elisa dkk perihal operasionalisasi camp pengungsian di Pulau Galang dan menyempurnakan penelitian Bunari, dari sisi politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, selain jabaran latar belakang terjadinya migrasi pengungsi Vietnam ke Pulau Galang, peranan UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

METODE

Artikel ini merupakan kajian historis yang dilakukan pada bulan Februari hingga bulan April 2022. Proses metodologis ini dilakukan melalui empat langkah secara berurutan menurut *Louis Gottschalk* (1969) dalam bukunya yang berjudul *Understanding History: A Primary of Historical Method*, mulai dari proses pengumpulan data (Heuristik), melakukan kritik sumber (Verifikasi), menginterpretasi data (Interpretasi), dan menulis hasil penelitian (Historiografi)¹¹. Pada tahapan heuristik, data primer diambil dari dokumen Vietnam-camp reffuge, dan observasi lapangan di Pulau Galang. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan. Tahapan verifikasi di dapati melalui kritik internal maupun eksternal data, yang disajikan dalam fakta mental, maupun sosial. Baru diinterpretasikan secara analitis dan sintesis, pada tahapan interpretasi. Tahapan akhirnya, penulisan fakta sejarah ini dituliskan dengan narasi komprehensif secara historiografi deskriptif-eksplanatif atau deskriptif-argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Migrasi Pengungsi Vietnam Ke Pulau Galang

Hal yang melatar belakangi terjadinya migrasi pengungsi Vietnam ke Pulau Galang, dijelaskan kedalam tiga bagian yakni tentang perang Vietnam, ekspansi Vietnam ke

⁷ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," *Al-Hikmah* 3, no. 1 (February 7, 2017): 32-48.

⁸ Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan* (Penerbit LINDAN Bestari, 2020).

⁹ Elisa, Yuliantoro, and Fiqri, "Pulau Galang Sebagai Pulau Kemanusiaan."

¹⁰ Bunari, "Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam."

¹¹ Wulan Sukmana et al., "Metode Penelitian Sejarah" (April 26, 2021).

Kamboja dan tahapan mulai migrasinya masyarakat Vietnam. Hal ini direkonstruksikan melalui pemahaman teori tentang migrasi, definisi pengungsi, teori konflik dan politik luar negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI).

1. Perang Vietnam

Latar belakang adanya terjadinya migrasi masyarakat Vietnam yang akhirnya melahirkan manusia perahu, tidak terlepas dari situasi dan kondisi politik di Vietnam yang pada saat itu sedang mengalami peperangan berkelanjutan. Pertama ialah perang rakyat Vietnam melawan intervensi asing dari Jepang dan Prancis 1944-1954, kedua perang rakyat Vietnam melawan intervensi asing dari Amerika Serikat 1957-1975 dan yang ketiga perang rakyat Vietnam melawan Kamboja yang didalamnya terdapat intervensi dari dua negara komunis yang memiliki pengaruh yang cukup kuat yaitu dari Uni Soviet dan RRC.¹²

Dalam perang saudara 1957-1975, Vietnam Utara keluar sebagai pemenang perang dibawah gerakan FPNVS (Front Pembebasan Nasional Vietnam Selatan) atau yang biasa disebut dengan Viet Cong. Gerakan ini memiliki beberapa tujuan yaitu melawan rezim Saigon dibawah kekuasaan negara imperialis Amerika Serikat, menciptakan Vietnam Selatan yang terhindar dari intervensi asing, ingin mempersatukan seluruh Vietnam serta ingin memperbaiki kehidupan sosial ekonomi dalam bentuk revolusi sosial.

Kemenangan Vietnam Utara pada peperangan melawan rezim Saigon/ Vietnam Selatan tersebut menjadikan Vietnam bersatu di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Apabila dihubungkan dengan teori konfliknya Ralf Dahrendorf bahwa dalam konflik tersebut akan menimbulkan konsep kepentingan. Konsep kepentingan yang dimaksud dalam pandangan Ralf Dahrendorf ialah akan adanya golongan superordinat dan subordinat yang artinya adanya golongan yang menguasai dan di kuasai. Dalam hal ini Vietnam Utara di bawah kekuasaan Ho Chi Minh mencoba untuk memasukkan ideologinya yaitu komunis kepada Vietnam Selatan. Selain itu juga Pemerintahan Ho Chi Minh akan dilakukan penyebaran pengaruh komunis dan re-edukasi (semacam indoktrinasi) kepada rakyat Vietnam Selatan. Seperti kata pepatah klasik yang menyebutkan bahwa revolusi selalu menelan anak-anaknya sendiri¹³. Maksud dari pernyataan tersebut adalah para tentara atau rakyat Vietnam khususnya Vietnam Selatan yang berjuang melawan Rezim Saigon pada waktu dan berjuang bersama Vietnam Utara, ketika telah mendapatkan kemenangan, mereka malah di buang dan di masukkan ke dalam penjara. Akibatnya banyak yang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari nasib yang buruk yang akan menimpa mereka. Itu adalah satu dampak yang di timbulkan dari kebijakan re-edukasi yang di lakukan oleh Ho Chi Minh.

2. Invasi Vietnam ke Kamboja

Selain gejolak yang terjadi di dalam negeri, seperti yang di cita-citakan oleh Ho Chi Minh yang ingin menyatukan Vietnam dan negara sekitarnya di bawah Pemerintahan Ho Chi Minh menimbulkan invasi yang dilakukan oleh Vietnam ke Kamboja dan Laos. Dalam usaha menaklukkan Laos, Ho Chi Minh tidak menemukan kesulitan yang berarti karena komunis memang telah berkuasa di Laos dengan pemimpinnya yang bernama Pathet Lao.

¹² Nauvarian, "Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam."

¹³ TEMPO, "TEMPO," *Koran Tempo*, Agustus 1982.

Kemudian invasi di lanjutkan untuk menaklukkan Kamboja. Di Kamboja, Vietnam tidak memperoleh kemudahan yang sama seperti halnya di Laos.

3. Migrasi Masyarakat Vietnam

Bagi masyarakat Vietnam, daripada menjadi korban dari perang, lebih baik mereka meninggalkan negaranya. Hal tersebut dilakukan orang-orang Vietnam yang ingin mendapatkan hidup yang lebih tenang dan memilih meninggalkan negaranya pada tahun 1975. Dengan menggunakan perahu, mereka mengarungi laut Cina Selatan dan masuk ke beberapa negara Asia Tenggara dengan ilegal dan dikenal dengan sebutan manusia perahu atau *boat people*. Hal tersebut ternyata menimbulkan masalah untuk dunia internasional. Sehingga permasalahan orang-orang Vietnam ini menjadi tanggung jawab PBB. Mereka yang mengungsi ada yang terdampar di Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura serta Indonesia. Di Indonesia, pertama kali masyarakat Vietnam tiba di Pulau Laut, Kecamatan Bunguran, Kepulauan Natuna pada 25 Mei 1975.

Peran UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Masalah Pengungsi Vietnam

Dalam menjelaskan dan membahas bagian ini, peneliti menggunakan konsep politik luar negeri Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menganalisis alasan Indonesia ikut serta dalam menanggulangi masalah manusia perahu Vietnam dan kebijakan Indonesia pada saat itu. Politik luar negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.

1. Peran UNHCR Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengungsi Vietnam

Permasalahan yang muncul akibat adanya konflik di Vietnam dan Kamboja membuat negara-negara kawasan Asia Tenggara mau tidak mau ikut serta dalam penyelesaian konflik karena akibat dari konflik tersebut banyak warga Vietnam yang meninggalkan negaranya yang kemudian memasuki beberapa wilayah negara-negara di ASEAN. Hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi negara-negara sekitar yang didatangi oleh pengungsi Vietnam yaitu karena mereka menilai bahwa kedatangan para pengungsi tersebut dapat mengganggu kestabilan di negara mereka sehingga para pengungsi tersebut ada yang diusir dari mereka ada juga beberapa negara yang tetap memberikan tempat bagi para pengungsi tersebut.

UNHCR sebagai lembaga PBB yang bergerak dalam penyelesaian masalah pengungsi turun tangan dalam menyelesaikan status para pengungsi Vietnam yang pada awalnya mencari suaka. Solusi yang di tawarkan oleh UNCHR untuk para pengungsi Vietnam sebagaimana yang tertera dalam pasal 1 Statuta UNCHR mencarikan satu dari tiga solusi jangka panjang yaitu Pemulangan Sukarela (*Repatriation*), Penempatan di negara ketiga (*Resettlement*), Integrasi Lokal.¹⁴

Dalam kasus pengungsi dari Vietnam ini terlihat jelas bahwa mereka meninggalkan negaranya karena adanya paksaan atau persekusi dari pemerintahan Ho Chi Minh. Pemerintahan Ho Chi Minh melakukan indoktrinasi atau penyebarluasan pengaruh komunis ke Vietnam Selatan yang pada saat itu di kuasai oleh Ngo Dinh Diem merupakan anti komunis, sebagai upaya mempersatukan Vietnam sebelum

¹⁴ Lukman Prakoso, "Defense Public Policy in the Handling People Smuggling in Batam Waters, Indonesia," *Degres* 20 (June 6, 2021): 167-174.

mempersatukan kawasan Indocina (Vietnam, Laos dan Kamboja) dibawah kepemimpinannya.

Bagi masyarakat Vietnam yang telah mendapat status pengungsi dari UNHCR, UNHCR bertanggung jawab penuh terhadap nasib para pengungsi tersebut. UNHCR melakukan pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN yang di selenggarakan di Bangkok. Pertemuan pada tanggal 21 Februari 1979 tersebut menghasilkan *Bangkok Statement*. Salah satu isi dari pertemuan di Bangkok tersebut ialah tiap negara-negara ASEAN membantu meringankan beban pengungsi dengan menyiapkan suatu tempat untuk penampungan sementara. Tempat penampungan sementara itu digunakan sebagai tempat tinggal sementara para pengungsi sebelum akhirnya akan dipulangkan kembali ke negara asal ataupun dikirim ke negara ketiga.

Para negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand setuju dengan hasil dari pertemuan tersebut namun negara-negara tersebut hanya menyediakan tempat untuk para pengungsi tinggal. Untuk biaya pemeliharaan para pengungsi itu tanggung jawab UNHCR badan PBB yang bergerak menangani masalah pengungsi.

Untuk lebih memudahkan UNHCR dalam membantu mengatasi permasalahan pengungsi di ASEAN, maka konfrensi internasional yang di hadiri oleh 70 pemerintah mulai menggunakan pendekatan regional yang kemudian dikenal sebagai rencana aksi yang komprehensif atau *Comprehensive Plan Action/ CPA*. Ini merupakan kebijakan yang mempunyai ketergantungan dan komitmen antara negara-negara suaka pertama di Asia Tenggara yang memiliki tempat penampungan untuk pengungsi Vietnam. Kebijakan CPA juga di tujukan untuk mengurangi keberangkatan secara sembunyi-sembunyi serta mempromosikan migrasi legal yang pada akhirnya dilakukan penyaringan regional dan repatriasi. Lima tujuan dari CPA ialah untuk mengurangi keberangkatan pengungsi secara sembunyi-sembunyi, untuk memberikan suaka pertama kepada para pengungsi hingga solusi untuk para pengungsi tersebut ditemukan, untuk menentukan statusnya sebagai pengungsi sesuai standar dan kriteria internasional, memberikan pelajaran dan keterampilan kepada para pengungsi untuk memulangkan kembali para pengungsi ke negara asal. Kebijakan CPA tersebut sangat membantu kerja dari UNHCR dalam menangani permasalahan manusia perahu Vietnam di Asia Tenggara serta dengan adanya kerja sama yang baik antara negara-negara ASEAN yang menerima para pengungsi Vietnam tersebut atas dasar kemanusiaan juga membuat kerja UNHCR tidak terlalu berat.

2. Peran Indonesia Dalam UNHCR

Indonesia menjadi bagian dari UNHCR terhitung sejak tahun 1979 ketika Indonesia atas dasar kemanusiaan menerima para pengungsi Vietnam dan para pengungsi tersebut dipusatkan di Pulau Galang. Kantor pusatnya berada di Jakarta. Pada masa awal berdirinya di Indonesia, aktivitas UNHCR berfokus pada penanganan pengungsi Vietnam yang pada saat itu menjadi masalah juga di beberapa negara Asia Tenggara. Tanggung jawab UNHCR dalam menangani pengungsi Vietnam ini di rumuskan dalam CPA.

Indonesia belum menjadi negara peserta dalam Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967 serta belum memiliki sebuah penentuan status pengungsi. Dengan demikian, pemerintah memberikan wewenang kepada UNHCR untuk menjalankan segala urusan terhadap perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia memberikan otorisasi untuk mendirikan pusat pemrosesan pengungsi di Pulau Galang salah satu Pulau yang

berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mengakomodir lebih dari 170.000 pengungsi hingga saat kamp tersebut di tutup pada tahun 1996.

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN, ikut merasakan dampak negatif membanjirnya pengungsi Vietnam. Menteri Luar Negeri RI Mochtar Kusumatmadja pada tanggal 15 Februari 1979 di Manila menyatakan bahwa pihak Vietnam sebaiknya turut mengambil bagian dalam menaggulangi masalah pengungsi dan Amerika Serikat harus berperan lebih aktif dalam memukimkan kembali para pengungsi karena keterlibatan mereka dalam perang lah yang menjadi pemicu terjadinya arus pengungsi dari Vietnam. Dapat di lihat bahwa Indonesialah sebagai negara pelopor untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Vietnam tersebut.

Setelah pertemuan tersebut membuat para negara-negara ASEAN mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan manusia perahu Vietnam dengan melakukan pertemuan pada 21 Februari 1979 di antara para Menteri Luar Negeri tiap negara ASEAN yang di selenggarakan di Bangkok. Pertemuan tersebut menghasilkan *Bangkok Statement*. Isi dari pertemuan tersebut ialah negara-negara ASEAN setuju bekerja sama untuk meringankan beban manusia perahu atau pengungsi Vietnam (penetapan status pengungsi di berikan setelah UNHCR melakukan verifikasi terhadap manusia perahu Vietnam).

Bentuk kerja sama tersebut ialah menyiapkan tempat untuk *processing centre* (pusat pemrosesan), sebagai tempat transit dengan batas waktu dan jumlah tertentu sesuai dengan kemampuan negara masing-masing. April 1979, pemerintah Indonesia mengusulkan Pulau Galang dan Pulau Rempang kepada Paul Harthing *Commisioner* UNHCR sebagai pusat pemrosesan pengungsi Vietnam. Yang dilanjutkan pertemuan UNHCR dengan 24 negara pada tanggal 15-16 Mei 1979, yang hasilnya meminta pemerintah Indonesia membentuk tim pembangunan tempat pemrosesan pengungsi. Dituangkan dalam gerakan cepat Pemerintah RI pada 11 September 1979 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia yang terdiri atas Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Departemen Dalam Negeri.

Berdasarkan dari keputusan Presiden tersebut, maka di bentuklah tim P3V (Penanggulangan dan pengelolaan Pengungsi Vietnam) dengan Mayjen Moerdani (Asintel Hankam) ditunjuk sebagai ketuanya. Pada tingkat daerah di bentuk P3V Daerah yang di pimpin oleh laksamana Pertama Abu, Panglima Kodamar Riau. Kemudian untuk satuan pengamanan dan perawatan di bawah pimpinan Letkol Polisi Drs. Koenarto. Tim P3V inilah yang ditugaskan untuk mencari pulau yang sesuai dengan persyaratan untuk memproses para pengungsi Vietnam.

Pemilihan Pulau Galang sebagai tempat memproses para pengungsi Vietnam tersebut karena wilayah Pulau Galang merupakan tempat yang strategis dan memenuhi persyaratan yang sangat cocok sebagai tempat pemrosesan. Jika di lihat secara letak geografis, Pulau Galang bertetangga dengan negara Singapura dan Malaysia sehingga dapat memudahkan jalur komunikasi dan kerja sama antar negara tersebut selama masa memproses para pengungsi Vietnam. Selanjutnya mudah untuk menyalurkan pengungsi ke negara ketiga, wilayahnya cukup luas untuk pendirian kamp pengungsi, penduduknya

sedikit serta tempat tersebut mudah di capai demi keperluan bantuan logistik baik itu dari pemerintah pusat maupun dari negara tetangga.¹⁵

Hubungan kemitraan pemerintah Indonesia dengan UNHCR berlangsung selama Kamp Penampungan pengungsi ini dibuka, mulai dari urusan imigrasi oleh Kantor Urusan Imigrasi Indonesia, P3V (Pusat Penanganan Pengungsi Vietnam) yang dikordinir Indonesia, untuk urusan ketertiban dan keamanan melalui Polri serta Brimob di bawah P3V, Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan darat), PMI dan lain sebagainya.

Gambaran Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pengungsi Vietnam di Pulau Galang

1. Pulau Galang Sebagai Tempat Pengelolaan Pengungsi

Pulau Galang terpilih menjadi tempat pengelolaan pengungsi, daripada Pulau Rempang sebagaimana yang diusulkan Pemerintah Indonesia pada UNHCR, dikarenakan Pulau Rempang di huni oleh penduduk yang lebih banyak dari Pulau Galang. Untuk memudahkan isolasi pengungsi dan stabilisasi keamanan dan ketertiban nasional.

2. Kehidupan Sosial

Pengungsi Vietnam yang berada di Pulau Galang terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda mulai dari yang terpelajar hingga rakyat biasa. Mulai dari mantan menteri, bankir, mantan anggota parlemen, tentara, guru, pelajar, dokter, perawat, olahragawan, seniman, pedagang, biarawati bahkan orang-orang prokomunis menjadi penghuni kamp pengungsi Pulau Galang.

Karena ada dua kemungkinan untuk pengungsi Vietnam di Pulau Galang, yakni Pemulangan Sukarela (*Repatriation*) dan Penempatan di negara ketiga (*Resettlement*), maka kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemeliharaan pengungsi Vietnam terus dikembangkan. Mereka yang ingin pergi ke negara ketiga, harus mengurus administrasi permohonan atau dipilih berdasarkan tes kesehatan para pengungsi. Setelah mengurus administrasi, para pengungsi akan diwawancarai oleh pegawai UNHCR ataupun Indonesia. Setelah melewati wawancara tersebut, mereka harus menunggu panggilan dari UNHCR ataupun Pemerintah sebelum dikirim ke negara ketiga.

Ketika dalam masa menunggu panggilan, biasanya para pengungsi melakukan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan mereka. Ada yang bercocok tanam, ada yang menawarkan tenaganya sebagai sukarelawan yang membantu aktivitas PMI, UNHCR dan organisasi sosial lainnya sebagai tenaga penerjemah, tenaga pengajar, dokter dan perawat. Hal tersebut dapat dilakukan karena latar belakang para pengungsi ini beragam dari yang berpendidikan dan juga rakyat biasa.

Selain itu, ada juga pengungsi yang mengisi waktu mereka sebelum menerima panggilan untuk dikirim ke negara ketiga membuat organisasi untuk mengatur dan memantau kegiatan para pengungsi di Pulau Galang. Mereka ada yang menjadi ketua kamp pengungsi, ketua tiap barak, dan seksi lain di organisasi tersebut. Adanya organisasi tersebut sedikit meringankan tugas dari TNI untuk melakukan pengawasan terhadap para pengungsi. Selain sebagai tenaga kerja, ada pula pengungsi yang mengisi waktu luangnya dengan mengikuti keterampilan bahasa ataupun keterampilan lainnya yang tersedia. Bagi anak-anak biasanya mengikuti kegiatan pendidikan dan olahraga maupun kepemudaan.

¹⁵ Ismayawati, *Manusia Perahu: Tragedi Kemanusiaan Di Pulau Galang*, 2013.

Untuk mempersiapkan para pengungsi sebelum dikirim ke negara ketiga, diselenggarakan pendidikan dan pembekalan untuk menghilangkan rasa trauma akibat apa yang terjadi di Vietnam serta untuk mengembalikan kepercayaan diri para pengungsi. Awalnya kegiatan ini dirintis oleh Miss Harriet Jacobson yang merupakan pekerja sosial.¹⁶ Pelatihan kursus bahasa Inggris, latihan kepramukaan, pelatihan keterampilan menjadi kegiatan yang ditekuni oleh para pengungsi. Organisasi pendidikan baik itu dari dalam ataupun luar negeri yang mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh para pengungsi. Untuk pendidikan para pengungsi, terbagi dalam tiga kategori yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan, sekolah-sekolah tersebut juga dilengkapi perpustakaan sebagai tung baca dan mencari informasi bagi pengungsi.

Untuk program bahasa Inggris yang merupakan pelajaran wajib untuk para pengungsi yang akan dikirim ke negara ketiga, terbagi dalam tiga kategori yaitu anak-anak, dewasa dan program spesial bagi mereka yang akan dikirim ke Amerika Serikat. Selain pendidikan bahasa Inggris, juga terdapat pengajaran dalam bahasa Jerman dan Perancis. Untuk pendidikan kejuruan dibuka dalam beberapa bidang yaitu kursus mekanik dan elektro. Kursus keterampilan tangan seperti merajut, menjahit dan membordir. Kursus kejuruan ini biasanya diutamakan untuk orang dewasa. Setelah mengikuti kursus keterampilan, muncul orang-orang yang memiliki keterampilan khusus dan itu menjadi sumber pendapatan mereka untuk bekal mereka di negara ketiga seperti penjahit, pelukis dan pembuat kerajinan tangan lainnya.

Kegiatan sosial juga dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari para pengungsi Pulau Galang. Pembinaan kegiatan pemudaan dan olahraga diharapkan dapat menumbuhkan interaksi sosial di antara sesama pengungsi. Salah satu kegiatan kepemudaan yang dilakukan ialah pramuka. Dalam pramuka, mereka diajarkan untuk menjalani hidup yang mandiri dan mengurangi rasa ketergantungan pada orang lain melalui perkemahan. Selain itu dalam hal olahraga yang ditujukan untuk menjalin kedekatan di antara sesama pengungsi diadakan pertandingan olahraga seperti sepakbola, tenis meja, tarik tambang dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut membangkitkan semangat persatuan di antara pengungsi. Para pengungsi juga biasanya menggunakan fasilitas olahraga *fitness centre* yaitu tempat pemusatan kebugaran bagi para pengungsi agar dapat menjaga kondisi fisik tubuhnya dari penyakit. Terdapat juga *centre* yaitu tempat pemusatan para remaja seperti melakukan kegiatan pramuka dan lain-lain.

Untuk kegiatan kerohanian, para pengungsi dibimbing oleh pemuka agama untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Melalui kegiatan keagamaan ini, para pengungsi dapat merasakan rasa prikemanusiaan sehingga dapat merasakan perhatian, cinta dan penghargaan sebagai manusia seutuhnya.

3. Kehidupan Ekonomi

Dalam kesehariannya, para pengungsi Vietnam ini dibiayai oleh UNHCR termasuk segala kebutuhannya perhari. Pada mulanya makanan didistribusikan oleh Puskopal (Pusat Koperasi Angkatan Laut) dan dilanjutkan oleh PT. Bawok Sinom. Berupa beras, makanan kaleng, sayur segar dan ikan/daging/ telur yang dibagikan perlima hari sekali

¹⁶ Ibid.

kepada setiap barak. Ketua barak yang membagikan kepada masing-masing anggotanya.¹⁷ Seperti yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Bahan makanan pokok yang diterima per lima hari perorang sejak 1980¹⁸

Makanan	Berat (gr)	Kalori	Protein	Lemak		Jumlah kalori
Beras	400	1.400	32	-	320	1663.32
Garam	-	-	-	-	-	-
Gula Pasir	20	78.8	-	-	-	78.80
Teh	5	-	-	-	-	-
Cabe Kering	5	-	-	-	-	-
Kacang Hijau	20	64	4.8	2.4	6.4	32.24
Mie Kering 3 Pack	50	175	4	-	40	355.40
Sayur Segar	40	20	1.2	-	4	31.32
Susu Bubuk	30	132	8.4	8.4	10.8	288.84
Minyak Sayur	16.6	362.2	23.24	23.14	29.88	799.11
Kecap	13.3	-	-	-	-	-
Makanan Kaleng						
Pork Leg						
With Mushroom	79.4	150	15.88	9.528	-	303.72
Curry Chicken	60	114	12	7.2	-	230.16
Ikan Sarden	79.4	150.86	15.88	9.528	-	303.72

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk kehidupan sehari-hari para pengungsi Vietnam dapat dikatakan terpenuhi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Itu semua merupakan jatah tiap orang untuk 5 hari sehingga dapat menghindari terjadinya perebutan jatah. Transaksi jual beli juga terjadi di pasar. Pasar tersebut memulai aktivitas mulai dari jam 8 pagi. Di pasar tersebut terdapat warung kelontong, jual beli dollar, warung makan, kedai kopi sampai rumah pemutaran video Mandarin. Semua kegiatan bisnis itu digerakkan dan merupakan inisiatif dari pengungsi. Semua itu merupakan hal yang dilakukan oleh para pengungsi untuk mengisi kekosongan waktu sebelum mereka dilakukan *screening* oleh P3V maupun UNHCR untuk menyaring yang mana saja yang layak untuk dikirim ke Negara ketiga atau mereka yang dipulangkan kembali ke Negara asal. Selain melakukan kegiatan dipasar, pengungsi juga melakukan sistem barter dengan penduduk asli. Hal tersebut merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pengungsi Vietnam dengan penduduk asli setempat. Namun untuk berinteraksi hanya bisa dilakukan pada pagi dan siang hari saja karena sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh TNI yang menjaga keamanan di pulau Galang. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan yang dilakukan para pengungsi tidak tertanggung serta untuk menghindari adanya pengungsi yang kabur.

¹⁷ Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, "Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia, Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996" (Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, 2012).

¹⁸ Kunarto, "Pengamanan dan Perawatan Pengungsi Vietnam di Pulau Galang." (Satpamwat Sinam Galang, Batam, 1980).

KESIMPULAN

Ketidaktentraman kehidupan masyarakat Vietnam, setelah melewati perang berkepanjangan dalam mencapai kemerdekaannya, mulai dari perang melawan perancis, perang saudara 1957-1975, invansi Vietnam ke Kamboja, jatuhnya Saigon Vietnam Selatan (berpaham nasionalis) ke Vietnam Utara (berpaham komunis), kebijakan re-edukasi untuk menghapus pemikiran-pemikiran yang muncul di Vietnam Selatan yang berbeda dengan Vietnam Utara karena pengaruh dari Amerika Serikat. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong utama ekspansi Vietnam ke Kamboja. Perang tidak dapat dihindari sehingga membuat kehidupan masyarakat sekitar Indocina semakin tidak menentu. Hal inilah yang membuat masyarakat Vietnam Selatan memilih untuk mengungsi dan meninggalkan negaranya menggunakan perahu untuk mengarungi lautan yang luas, sehingga disenutlah pengungsi Vietnam ini dengan sebutan manusia perahu (*boat people*).

Peranan UNHCR sebagai lembaga PBB yang bergerak menangani pengungsi baru terlihat pasca kesepakatan Negara-negara ASEAN di Bangkok, yang menghasilkan *Bangkok Statement*, yang berisikan tentang upaya meringankan beban para pengungsi Vietnam. Negara-negara ASEAN menyediakan tempat penampungan pengungsi, sedangkan pembiayaan pemeliharaan menjadi tanggungjawab UNHCR. Peranan pemerintah Indonesia sebagai Negara yang juga menjadi tujuan migrasi masyarakat Vietnam adalah berperan aktif menyelesaikan permasalahan pengungsi Vietnam melalui berbagai forum internasional, baik ditingkat ASEAN maupun ditingkat PBB melalui koordinasi UNHCR. Sebagai Negara yang berideologi Pancasila, dengan politik luar negeri yang bebas aktif, langkah nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan penyediaan tempat bagi para pengungsi Vietnam disalah satu pulau yang ada di kota Batam, tepatnya di Pulau Galang. Pembentukan Tim P3V (Pengamanan dan Perawatan Pengungsi Vietnam) sebagai pengatur dan pengkordinir kegiatan dan pengamanan pengungsi Vietnam selama berada di Pulau Galang adalah wujud dari rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diajarkan dalam sila kedua Pancasila. Bahkan hingga proses pemulangan dan pengiriman pengungsi kenegara ketiga, langkah pembentukan Kogas (Komando Tugas) untuk mempercepat pemulangan pengungsi sebagaimana arahan dari UNHCR dibentuk untuk tugas kemanusiaan ini.

Kehidupan para pengungsi Vietnam di Pulau Galang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Indonesia dan UNHCR. Fasilitas tempat pengungsian atau barak, tempat hiburan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan lain sebagainya semua disiapkan untuk kehidupan para pengungsi yang diisolasi dari dunia luar, agar tidak dapat melarikan diri dan mengganggu stabilitas daerah. Para pengungsi diberikan jatah makan tiap harinya. Meskipun, para pengungsi juga membangun pasar sendiri untuk kegiatan jual beli mereka seperti warung kopi, warung makan, dan sebagainya. Pembangunan pasar ini merupakan upaya untuk mengisi kekosongan waktu para pengungsi, mengisi kebosanan dan sara silaturahmi antar pengungsi.

Terlepas dari *plus minus* berbagai sisi sejarah pengungsi Vietnam di Pulau Galang dalam rentang waktu 1979-1996, pemerintah Indonesia telah maksimal mengatasi permasalahan pengungsi Vietnam, tergambar dengan dinobatkannya kamp pengungsian pulau galang menjadi kamp pengungsian terbaik se-Asia Tenggara berdasarkan amatan UNHCR.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidarti, Agustina. *Teori Kependudukan*. Penerbit Lindan Bestari, 2020.
- Bunari, Bunari Bunari. "Pulau Galang Sebagai Penampungan Pengungsi Vietnam." *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan* 4, no. 1 (2017): 25-37.
- Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya. "Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia, Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996." Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, 2012.
- Elisa, Yuliantoro, and Asyrul Fiqri. "Pulau Galang Sebagai Pulau Kemanusiaan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (December 6, 2021): 409-411.
- Ismayawati. *Manusia Perahu: Tragedi Kemanusiaan Di Pulau Galang*, 2013.
- Kompas. "Pengungsi Vietnam (Boat People)." Jakarta, Mei 2001.
- Kunarto. "Pengamanan dan Perawatan Pengungsi Vietnam di Pulau Galang." Satpamwat Sinam Galang, Batam, 1980.
- Nauvarian, Demas. "Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam: Faktor Ideologi, Identitas, dan Idealisme." *Jurnal Hubungan Internasional* 12, no. 2 (December 10, 2019): 265.
- Prakoso, Lukman. "Defense Public Policy in the Handling People Smuggling in Batam Waters, Indonesia." *Degres* 20 (June 6, 2021): 167-174.
- Simanulang, Katerina Mayumi. "Pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 Dalam Rangka Pemulangan Pencari Suaka Asal Vietnam Tahun 1996 Di Pulau Galang Ditinjau Dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-II.01.10-1297 Perihal Penanganan Terhadap Orang Asing Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi." S1, UAJY, 2015. Accessed April 20, 2022. <http://e-journal.uajy.ac.id/7285/>.
- Sukmana, Wulan, Program Studi, Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan, and Ilmu Pendidikan. "Metode Penelitian Sejarah" (April 26, 2021).
- TEMPO. "TEMPO." *Koran Tempo*, Agustus 1982.
- Tualeka, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Al-Hikmah* 3, no. 1 (February 7, 2017): 32-48.